

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.M. Yunus Wahid. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta. Prenada Media Group.
- Arief Pramudya. 2009. Mengenal Kehidupan di Hutan. Jakarta. Pacu Minat Baca Wisma Hijau.
- Abu Daud Busroh. 1998. Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan, Yogyakarta. Kanisius.
- Anang Firmansyah dan Budi W Mahardika. 2018. Pengantar Manajemen. Yogyakarta. Deepublish.
- Ahmad Redi, 2014, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Khakim, 2005, Hukum Kehutanan Indonesia (dalam era otonomi Daerah), Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang Pamuladi, 1999. Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT Rafika Aditama.
- Hadi, S.T. 2005. Undang-Undang Kehutanan Beserta Peraturan Perubahannya. Jakarta. Harvarindo.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media : Bandung;
- Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Jan Michiel Otto. 2003. Kepastian Hukum di Negara Berkembang. terjemahan Tristam Moeliono. Jakarta. Komisi Hukum Nasional.

- Kementerian Kehutanan. 2016. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT.Pareke. 2018. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Bengkulu. CV. Zigie Utama.
- Makmur, 2011, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administerasi Negara. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim. 1997. Dasar- Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta. Sinar Grafika
-2013. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simon H. 1976. Pengantar Ilmu Kehutanan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1994. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis) Jakarta. BPFE.
- Soerianegara. 1996. Ekologi, Ekologisme dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor. Fakultas Kehutanan IPB.
- Said G. 1985. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta. PT. Media Swana Press.
- Soerjono Soekanto. 1999. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis). cetakan keempat. Jakarta. UniversitasIndonesia.
- Sujamto, 1983, Beberepa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta. Kanisius.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang
Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433/Kpts-II/1993

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan

C. JURNAL/MAKALAH

Abrar Saleng, 2013, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam, Membuni
Publishing, Makassar.

Aminuddin Salle dkk, 2010, Bahan Ajar Hukum Agraria, As Publishing,
Makassar.

Djaenudin. 1994. Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pertanian dan
Tanaman Kehutanan. Bogor. Pusat Penelitian Tanah dan
Agroklimat.

Fadel Muhammad Bahar Nur, 2021, Pengawasan Perusakan Hutan Di
Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa, Makassar,
Universitas Hasanuddin.

Fitri Nurfatirani dan Adi Nugroho, 2007, Manfaat Hidrologis Hutan di Hulu
DAS Citarum, Hasil Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Institut Pertanian Bogor.

Gerta Silamba, 2015, Urgensi Pengawasan Perizinan Pertambangan
Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah, Makassar, Universitas Hasanuddin

Hadijah, Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja, Fak. Kehutanan Unhas, Makassar

Junus M, R.M. Rosmaedy, J.J. Fransi, S. Soedirman, D. Songgeng dan A.R. Warsaka. 1984. Dasar Umum Ilmu Kehutanan, Buku I Hutan & Fungsi Hutan. Ujung Pandang. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Bagian Timur.

LB. Ngandung. 1976, Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia. Ujung Pandang. Pusat Latihan Kehutanan.

Mubyarto. 1985. Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

Rahmat. 2017. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Makassar. Universitas Muhammadiyah.

Siti Kotijah. 2009. Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan. Jakarta. Majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Susi Susanti. 2014. Peran Dinas Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan). Tanjung Pinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Setia Zain Alam. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan.

Sinukaban, N. 1994. Membangun Pertanian Menjadi Industri Yang Lestari Dengan Pertanian Konservasi. Bogor. IPB.ss

D. SUMBER INTERNET

<https://bisnis.tempo.co/amp/1444328/baru-diresmikan-jokowi-ini-detail-bandara-toraja>

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435

<https://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/>

<https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-bpn-ditetapkan-tersangka/>

<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel>

<https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-penerbitan-sertipikat-di-hutan-mapongka>

<https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/41/>

<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel>

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

<https://gemawan.org/244-lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>.

<https://www.menlhk.go.id/site/post/109>.

[https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Tulisan-Hukum-](https://bali.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Tulisan-Hukum-Tahura.pdf)

[Tahura.pdf http://www.birohumas.baliprov.go.id/](http://www.birohumas.baliprov.go.id/)